



Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Risiko Kredit Macet Pada Produk Konsumer & Ritel PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (Kantor Cabang Khusus Jakarta) Tahun 2020-2022

**Tabah Prasetyo¹, Eka Budi Yulianti²,
Morina Barus³**

Universitas Tama Jagakarsa

Alamat: Jl. TB Simatupang No.152 Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530

Email : tabahprasetyo03@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the Implementation of Risk Management Against Bad Credit Risk in Consumer & Retail Products of PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk (2020-2022 with a Descriptive approach. The data collection technique used in this research is documentation technique. through the collection of information sourced from financial reports from 2020 to 2022 at PT. Regional Development Bank of West Java and Banten. Based on this analysis, it can be seen that PT. Regional Development Bank of West Java and Banten controls risks, among others, by increasing capital, maintaining stability between lending and bad debts, and technical mitigation of lending risks. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten has approved a Risk Management policy which includes a Risk Management strategy and framework that is determined in accordance with the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance of the Bank. Non Performing Loan (NPL) at PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten from 2020 to 2022 on average has decreased. Overall, the NPL of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten can still be categorized into the condition of a bank that has a healthy Non Performing Loan (NPL), which does not exceed 5% in accordance with Bank Indonesia. This is because the implementation of risk management that is applied has been running in accordance with the provisions so as to minimize the risk of non-performing loans so that PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten can continue to maintain its status as a healthy bank.*

Keywords: *Risk Management, Bad Debt, Consumer and Retail Products*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Risiko Kredit Macet Pada Produk Konsumer & Ritel PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (2020-2022 dengan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. melalui pengumpulan informasi yang bersumber dari laporan keuangan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, menjaga stabilitas antara penyaluran kredit dengan kredit macet, dan teknis mitigasi risiko penyaluran kredit. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank. *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020 sampai 2022 secara rata-rata mengalami penurunan. Secara keseluruhan NPL PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten masih dapat dikategorikan kedalam kondisi Bank yang memiliki *Non Performing Loan* (NPL) secara sehat, yaitu tidak melebihi 5% sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan manajemen risiko yang diterapkan sudah berjalan dengan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dapat terus mempertahankan status sebagai Bank yang sehat

Kata kunci: *Manajemen Risiko, Kredit Macet, Produk Kostumer dan Ritel*

LATAR BELAKANG

Kondisi perekonomian suatu negara tidak lepas dari peran sebuah bank, termasuk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana masyarakat yang telah terhimpun di bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan kata lain, bank menjadi lembaga penghimpun dan penyalur keuangan masyarakat.

Hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan timbal balik. Nasabah membutuhkan kredit dari bank untuk melakukan kegiatan ekonominya, sedangkan bank membutuhkan dana dari nasabah yang diperoleh melalui bunga kredit untuk menunjang kegiatan operasionalnya, agar dapat selalu melayani nasabah. Dengan demikian yang disebabkan oleh kredit bermasalah tersebut, dan kegiatan bank sebagai lembaga perantara dan penyalur keuangan masyarakat tetap berjalan.

Bank saat ini harus menerapkan manajemen risiko, termasuk manajemen risiko macet harus dibawah 5%. Angka ini menunjukkan berapa persen kredit yang bermasalah dari keseluruhan kredit yang dikucurkan bank ke masyarakat. Risiko kredit bagi perbankan adalah risiko kerugian yang mungkin diderita bank karena kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Artinya, jika bank memiliki debitur yang tidak mampu melunasi kembali pokok pinjaman, membayar bunga serta kewajiban lainnya, maka bank berhadapan dengan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Di antara berbagai bank yang ada saat ini di provinsi Jawa Barat, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten merupakan salah satu bank yang telah memegang peranan penting terhadap kemajuan daerah ini semenjak didirikannya. Keistimewaan yang utama adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten merupakan pemegang kas daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sebagai bank yang menjadi badan usaha milik Daerah dan kebanggaan masyarakat, tentu saja tinggkat kepercayaan masyarakat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tersebut tinggi. Meskipun statusnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk wilayah Jawa Barat bukan berarti PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tidak bisa menjalankan kegiatannya didaerah-daerah lainnya termasuk dipusat pemerintahan Indonesia yaitu Jakarta maupun daerah lainnya. Penyaluran kredit atau pembiayaan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten belum tentu selalu lancar dan bebas dari risiko kredit. Oleh karena itu kredit yang disalurkan suatu bank harus dikelola dengan baik untuk mengurangi terjadinya kerugian sehingga dapat memberikan dampak positif pada perekonomian Jawa Barat.

Sebagai bank yang sedang berkembang, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten memiliki beberapa unit bisnis yaitu korporasi/komersil, KPR dan KKB, konsumen

dan ritel, pendanaan, usaha mikro dan kecil. Penelitian ini memfokuskan studi pada produk bisnis kredit konsumer & ritel. Kredit konsumer & ritel merupakan kredit dengan agunan yang bersifat konsumtif yang diberikan kepada perorangan yang biasanya digunakan oleh debitur untuk berbagai macam kebutuhan, fasilitas kredit ini diberikan kepada para pensiunan pegawai negeri/pegawai negeri/BUMN/TNI/Polri dengan plafond minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan memperhatikan usia nasabah yang mengajukan kredit. Kredit ini juga dipayungi oleh hukum dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan Instansi terkait. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten memiliki berbagai macam pilihan fitur produk kredit konsumer & ritel yang ditawarkan untuk berbagai macam solusi kebutuhan nasabah. Pilihan fitur produk yang ditawarkan pada segmen konsumer diantaranya adalah produk kredit guna bhakti pola 1, kredit guna bhakti ekstra pola 1, kredit abdi bhakti, kredit pra purna bhakti pola 1, kredit pra purna bhakti manfaat ganda, kredit pra purna bhakti grace period. Terdapat beberapa fitur produk lain yang ditawarkan pada segmen ritel diantaranya adalah kredit guna bhakti pola 2, kredit guna bhakti ekstra pola 2, kredit guna bhakti pola 3, kredit pra purna bhakti, kredit purna bhakti, kredit back to back loan.

Dengan seiring berjalannya waktu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terus melakukan ekspansi dengan tujuan membangun portofolio yang lebih besar. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terus melakukan inovasi, memperkuat sinergi, untuk mengakselerasi penyaluran kredit, termasuk di sektor konsumer dan ritel, seiring dengan tren pemulihan ekonomi dan semakin membaiknya konsumsi dan daya beli masyarakat, penyaluran kredit konsumer terus meningkat. Permintaan khususnya terjadi pada segmen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN, BUMN dan Perusahaan Swasta.

Sektor konsumer dan ritel memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta. Sektor konsumer dan ritel juga mempunyai peran penting karena mempunyai portofolio yang cukup besar kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta.

Portofolio Kredit

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta Tahun 2020-2022

| Tahun 2020 | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Sum of OUTSTANDING | Column Labels | | | | | | | |
| Row Labels | Divisi Komersial | Divisi Konsumer | Divisi Korporasi | Divisi KPR | Divisi Kredit BPR & LKM | Divisi Kredit Ritel | Divisi Mikro | Grand Total |
| 0074 | 216.163.023.617 | 13.298.172.006 | 80.412.371.135 | 94.910.823.294 | 21.409.508.572 | 320.435.064.759 | 4.543.292.023 | 751.172.255.406 |
| KC KHUSUS JAKARTA | 216.163.023.617 | 3.160.755.228 | 80.412.371.135 | 77.414.884.934 | 3.985.799.364 | 28.050.215.756 | 3.466.717.560 | 412.653.767.594 |
| Grand Total | 216.163.023.617 | 13.298.172.006 | 80.412.371.135 | 94.910.823.294 | 21.409.508.572 | 320.435.064.759 | 4.543.292.023 | 751.172.255.406 |
| | | 28,78% | 1,77% | 10,70% | 12,64% | 2,85% | 42,66% | 0,60% |

| Tahun 2021 | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Sum of OUTSTANDING | Column Labels | | | | | | | |
| Row Labels | Divisi Komersial | Divisi Konsumer | Divisi Korporasi | Divisi KPR | Divisi Kredit BPR & LKM | Divisi Kredit Ritel | Divisi Mikro | Grand Total |
| 0074 | 218.908.798.265 | 22.881.142.801 | 1.339.384.110.562 | 123.920.157.812 | 37.600.422.117 | 467.231.807.812 | 16.718.051.878 | 2.226.644.491.247 |
| KC KHUSUS JAKARTA | 218.908.798.265 | 4.257.419.896 | 1.339.384.110.562 | 105.437.932.803 | 16.063.163.566 | 43.192.244.923 | 15.417.477.419 | 1.742.661.147.434 |
| Grand Total | 218.908.798.265 | 22.881.142.801 | 1.339.384.110.562 | 123.920.157.812 | 37.600.422.117 | 467.231.807.812 | 16.718.051.878 | 2.226.644.491.247 |
| | | 9,83% | 1,03% | 60,15% | 5,57% | 1,69% | 20,98% | 0,75% |

| Tahun 2022 | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Sum of OUTSTANDING | Column Labels | | | | | | | |
| Row Labels | Divisi Komersial | Divisi Konsumer | Divisi Korporasi | Divisi KPR | Divisi Kredit BPR & LKM | Divisi Kredit Ritel | Divisi Mikro | Grand Total |
| 0074 | 268.995.784.593 | 38.092.080.718 | 5.815.509.787.421 | 156.712.769.403 | 73.076.237.769 | 703.901.537.267 | 39.420.660.226 | 7.095.708.857.397 |
| KC KHUSUS JAKARTA | 268.995.784.593 | 7.188.167.496 | 5.815.509.787.421 | 138.230.544.394 | 51.538.979.218 | 77.897.110.994 | 37.117.237.215 | 6.396.477.611.331 |
| Grand Total | 268.995.784.593 | 38.092.080.718 | 5.815.509.787.421 | 156.712.769.403 | 73.076.237.769 | 703.901.537.267 | 39.420.660.226 | 7.095.708.857.397 |
| | | 3,79% | 0,54% | 81,96% | 2,21% | 1,03% | 9,92% | 0,56% |

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus
Jakarta

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa total portofolio kredit konsumen yang disalurkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Kantor Cabang Khusus Jakarta). Dapat dilihat pada tahun 2020 total kredit yang diberikan sebesar 13.298.172.006 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu enam rupiah) dan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan kredit sebesar 9.582.970.795 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 72,06 % dan tahun 2022 mengalami pertumbuhan kredit sebesar 15.210.937.917 (lima belas milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) atau sebesar 66,48% .

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa total portofolio kredit ritel yang disalurkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Kantor Cabang Khusus Jakarta).

Dapat dilihat pada tahun 2020 total kredit yang diberikan sebesar 320.435.064.759 (tiga ratus dua puluh milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan kredit sebesar 146.796.743.053 (seratus empat puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 45,81 % dan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 236.669.729.455 (dua ratus tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 50,65%.

Dalam bidang perkreditan, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten berusaha menerapkan fungsi manajemen risiko mengingat industri perbankan selalu dihadapkan pada resiko kredit yang bermasalah (kredit macet). Tanpa manajemen risiko yang baik, petugas pemberi kredit hanya akan mengejar target dan berupaya meloloskan usulan kredit sebanyak dan sebesar mungkin tanpa mempertimbangkan hal-hal seperti: apakah dana dan bunga kredit yang diberikan akan dapat diterima kembali sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam ikatan perjanjian kredit, apakah ada kemungkinan penyelewengan dana dari pihak debitur, atau terjadi penyelewengan prosedur dari oknum intern pada saat proses pemberian kredit.

Berbagai kasus jatuhnya bank besar maupun lembaga keuangan non-bank yang telah terjadi sebelumnya, biasanya terjadi karena faktor kelalaian mereka dalam mengelola risiko.

Dari laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dapat diketahui berapa besar kredit yang diberikan dan kredit bermasalah/kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) perusahaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Nominative Loan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta Tahun 2020-2022

| Nominative Loan Konsumer & Ritel | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten | | | | | | | |
| Sum of OUTSTANDING | | Kolektibilitas | | | | | Grand Total |
| Tahun | Branch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2020 | Kantor Cabang Khusus Jakarta | 298.566.241.400 | 30.130.282.432 | 1.721.931.515 | 1.415.123.465 | 1.899.657.953 | 333.733.236.765 |
| 2021 | | 447.626.147.812 | 36.503.156.405 | 423.378.657 | 735.816.812 | 4.824.450.927 | 490.112.950.613 |
| 2022 | | 696.607.832.501 | 40.329.244.123 | 0 | 0 | 5.056.541.361 | 741.993.617.985 |

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Kantor Cabang Khusus Jakarta

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa total kredit dengan status kolektibilitas 1 (satu) atau kredit lancar konsumer & ritel pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan

Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta mengalami kenaikan. Dilihat pada tahun 2020 total kredit konsumen & ritel lancar sebesar 298.566.241.400 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 447.626.147.812 (empat ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 696.607.832.501 (enam ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus satu rupiah).

Kredit lancar mengalami peningkatan disebabkan oleh faktor internal yaitu adanya penerapan manajemen risiko yang sudah efektif seiring dengan berkembangnya portofolio pengajuan kredit baru dan untuk faktor eksternalnya bisa berupa tindakan nasabah yang melakukan pembayaran tunggakan angsuran atas pinjamannya. Peningkatan pada kredit lancar dapat mempengaruhi tingkat *Performing Loan*. Buat bank semakin tingginya angka kredit lancar merupakan suatu pertanda baik sebab bank dengan angka *Performing Loan* yang tinggi mampu dicap sebagai bank yang sehat.

Dan apabila kredit lancar mengalami penurunan disebabkan oleh faktor internal yaitu adanya penerapan manajemen risiko yang belum efektif terkait perihal monitoring pembayaran angsuran kredit nasabah sehingga menyebabkan terjadinya suatu penurunan kolektibilitas nasabah tersebut dan untuk faktor eksternalnya bisa berupa tindakan nasabah yang memiliki status kolektibilitas lancar kemudian nasabah tersebut melakukan take over memindahkan kreditnya ke bank lain, melakukan pelunasan sebelum jangka waktu kesepakatan perjanjian kredit berakhir. Penurunan pada kredit lancar dapat mempengaruhi tingkat Non Performing Loan (NPL). Buat bank semakin tingginya angka kredit kurang lancar merupakan suatu pertanda buruk sebab bank dengan angka Non Performing Loan (NPL) yang tinggi mampu dicap sebagai bank yang tidak sehat.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa total kredit dengan status kolektibilitas 2 (dua) atau kredit dalam perhatian khusus konsumen & ritel pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta mengalami kenaikan. Dilihat pada tahun 2020 total kredit konsumen & ritel dalam perhatian khusus sebesar 30.130.282.432 (tiga puluh milyar seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 36.503.156.405 (tiga puluh enam milyar lima ratus tiga juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima rupiah) dan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 40.329.244.123 (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

Kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang tercatat bahwa debitur telah menunggak cicilan kredit 1-90 hari. Kredit dalam perhatian khusus mengalami peningkatan disebabkan oleh faktor internal yaitu adanya penerapan manajemen risiko yang belum efektif maupun faktor eksternal berupa keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran atas pinjaman.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa total kredit dengan status kolektibilitas 3 (tiga) atau kredit kurang lancar konsumer & ritel pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta mengalami penurunan. Dilihat pada tahun 2020 total kredit konsumer & ritel kurang lancar sebesar 1.721.931.515 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah) dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 423.378.657 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan tahun 2022 mengalami penurunan tidak terdapat kredit dengan status kolektibilitas 3 (tiga).

Peningkatan pada kredit kurang lancar dapat mempengaruhi tingkat NPL. Buat bank tingginya NPL menjadi pertanda jelek sebab bank dengan angka NPL yang tinggi dicap sebagai bank yang tidak sehat.

Kredit kurang lancar ditandai dengan terdapatnya tunggakan angsuran pokok yang sudah melebihi satu masa angsuran. Namun belum melebihi dua masa angsuran, dan juga dikatakan kurang lancar apabila pembayaran bunga sudah menunggak hingga dua bulan namun belum melebihi tiga bulan.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa total kredit dengan status kolektibilitas 4 (empat) atau kredit diragukan konsumer & ritel pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta mengalami penurunan. Dilihat pada tahun 2020 total kredit konsumer & ritel diragukan sebesar 1.415.123.465 (satu milyar empat ratus lima belas juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 735.816.812 (tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan tahun 2022 mengalami penurunan tidak terdapat kredit dengan status kolektibilitas 4 (empat).

Kredit dengan status kolektibilitas 4 (empat) merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari).

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa total kredit dengan status kolektibilitas 5 (lima) atau kredit macet konsumer & ritel pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta mengalami kenaikan. Dilihat pada tahun 2020 total kredit konsumen & ritel macet sebesar 1.899.657.953 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4.824.450.927 (empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5.056.541.361 (lima milyar lima puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Kredit dengan status kolektibilitas 5 (lima) merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong Non Performing Loan (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

Kredit yang disalurkan bank akan mendapat balas jasa yang berupa bunga bank dan akan menaikkan profitabilitas bank. Selain itu kredit yang disalurkan juga mengandung resiko. Risiko tersebut berupa risiko kredit macet atau kredit bermasalah. Apabila kredit bermasalah tinggi maka angka NPL juga akan tinggi. Rasio ini menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang disalurkan bank. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta yang beralamat di MSIG Tower, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 21, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif.

Jenis data yang dipergunakan peneliti untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan atau pernyataan tentang penerapan manajemen risiko untuk mengurangi. Dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen dan catatan-catatan tentang perusahaan melalui pengumpulan informasi yang bersumber dari laporan keuangan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Resiko Kredit merupakan risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian atau kegagalan pempdamping usaha (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan bank ditetapkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP, kredit bermasalah adalah pemberian credit line dengan risiko adanya kemacetan pembayaran.

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang diawali dengan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan kontroling terhadap risiko-risiko portofolio. Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 mengidentifikasi empat aspek pokok yang sekurang-kurangnya dalam manajemen risiko yaitu diantaranya:

- a) Pengawasan aktif dewan komisaris dan dewan direksi,
- b) Kebijakan prosedur dan penetapan limit,
- c) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen risiko kredit,
- d) Pengendalian risiko kredit

3. Kredit macet (*Non Performing Loan*)

Kredit macet atau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasan yang diakibatkan adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur kredit bermasalah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yaitu salah satu risiko yang menjadi sumber penilaian kesehatan suatu bank dengan ketentuan NPL atau kredit macet harus dibawah 5% dimana angka ini menunjukkan berapa persen kredit yang bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan bank ke masyarakat.

PENELITIAN

A. Deskripsi

1. Risiko Kredit

Risiko kredit yang disebabkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Cabang Khusus Jakarta) merupakan kredit bermasalah. Kredit macet terjadi ketika peminjam gagal memenuhi kewajibannya berupa bunga atau pokok pinjaman saat jatuh tempo. Status kredit bermasalah dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Kurang Lancar
- b) Diragukan
- c) Macet

Kredit bermasalah dapat menyebabkan kerugian dan mempengaruhi operasional bank, sehingga praktik manajemen risiko harus diterapkan. Faktor kredit bermasalah yang dialami oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten disebabkan oleh:

a) Faktor Internal Bank

Kesalahan dalam penilaian risiko nasabah dan identifikasi risiko dapat menyebabkan masalah kredit. Karyawan bank juga rentan terhadap penipuan. Misalnya, pelanggan bisa saudara, teman dekat, tetangga, dll. Karena pinjaman, perusahaan yang memberikan pinjaman dievaluasi dengan cara yang mengarah pada fakta bahwa yang tepat tidak baik.

b) Faktor Nasabah

- 1) Nasabah melakukan pelanggaran indisipliner yang menyebabkan terjadinya pengurangan penghasilan
- 2) Keadaan rumah tangga nasabah kacau sehingga menyebabkan usahanya terhambat dan gagal memenuhi kewajibannya
- 3) Nasabah tidak menggunakan kreditnya untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain
- 4) Mengajukan kredit di bank lain sehingga nasabah keberatan untuk membayar angsuran
- 5) Nasabah sengaja tidak membayar angsuran walaupun memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

c) Faktor ekonomi dan sosial

1) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi Negara sangat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya kepada bank. Naiknya harga barang, bahan baku, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk menunjang ekonomisnya secara otomatis membuat nasabah memutuskan menunda atau tidak membayar kreditnya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya.

2) Faktor Sosial

Masalah sosial seperti kerusuhan, meningkatnya kriminalitas, masalah internal keluarga dan lain-lain mempengaruhi tingkat pengembalian kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

2. Risiko-risiko di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan Proses Manajemen Risiko

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan *risk awareness* yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (*risk culture*) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada Bank.

a) Manajemen risiko kredit

Secara umum eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama sehingga kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting.

b) Manajemen risiko pasar

Pada saat ini risiko yang dikelola PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten adalah risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten menggunakan standart model untuk menghitung dan memantau risiko suku bunga secara konsisten sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang berlaku.

c) Manajemen risiko operasional

Organisasi manajemen risiko operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat berada pada seluruh lini bisnis Bank dengan Pemimpin Unit Kerja sebagai penanggung jawabnya. Selain itu untuk mengawasi jalannya kegiatan operasional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat telah ditetapkan kontrol internal yang merupakan perpanjangan tangan Divisi Pengawasan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari sehingga risiko operasional dapat diminimumkan.

d) Manajemen risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Ada 2 penyebab munculnya risiko hukum pada Bank yaitu:

- 1) Bank dituntut secara hukum oleh *stakeholder*
- 2) Terdapat kelemahan atas aspek yuridis (aspek hukum) yang ada pada Bank misalnya ketidakpatuhan pada peraturan dan perundang- Undangan, serta kelemahan perikatan, misalnya tidak dipenuhinya persyaratan kontrak, pengikatan agunan yang tidak sempurna dan lain-lain.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat telah melakukan pengelolaan Risiko Hukum dengan baik dimana bank telah memiliki bidang khusus yaitu Bidang Hukum yang secara struktur organisasi berada dibawah Sekretariat Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas baik pidana, perdata, legalitas produk dan perjanjian Bank Sumut dengan pihak lain. Sekretariat Perusahaan Bidang Hukum secara bersama-sama dengan Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan dan satuan kerja Operasional (*risk taking unit*) melakukan review terhadap perubahan ketentuan atau peraturan tertentu yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko hukum.

e) Manajemen risiko strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Timbulnya risiko strategik dapat disebabkan antara lain oleh:

- 1) Kurang tepatnya penetapan dan pelaksanaan Strategi Bank.
- 2) Kurang tepatnya pengambilan keputusan Bank.
- 3) Kurang responsifnya Bank terhadap perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Pengelolaan risiko strategik di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dilakukan oleh Unit Kerja Perencanaan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang berada pada Divisi Perencanaan. Salah satu tugas Divisi Perencanaan adalah merumuskan rencana strategi Bank sesuai dengan kebijakan umum Direksi untuk dituangkan kedalam rencana kerja dan anggaran tahunan, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

f) Risiko reputasi

Risiko reputasi dapat terjadi karena disebabkan oleh tindakan-tindakan, peristiwa, atau kejadian yang dapat menimbulkan publikasi dan persepsi negatif yang dapat merugikan bank. Sekertaris perusahaan merupakan satuan kerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang memiliki peran strategis dalam mengelola risiko reputasi. Menjalankan fungsi pencegahan dan pengendalian publikasi negatif risiko reputasi yang terkait erat dengan pemberitaan negatif atau keluhan melalui media masa maupun media sosial.

g) Manajemen risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau yang bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan

Banten telah memiliki fungsi satuan kerja Kontrol Internal yang berada pada Divisi Manajemen Risiko dan fungsi satuan kerja Kepatuhan yang berada pada Divisi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Dalam menjalankan fungsi tugas wewenang dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko bekerja secara independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan antara kredit *bermasalah* (kredit kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet) dengan total kredit yang disalurkan bank. Apabila jumlah total kredit yang disalurkan cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas atau tidak tertagih dan mengakibatkan kredit tersebut *bermasalah* dan dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pada angka NPL. Penyebab kredit *bermasalah* disebabkan karena adanya perubahan ekonomi, karakter debitur, atau dari manajemen bank yang kurang berhati-hati dalam pemberian kredit.

Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit kurang lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet Total}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Konsumer & Ritel PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat pada tahun 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut:

Hasil Perhitungan *Non Performing Loan* Kredit Konsumer PT. Bank Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta Tahun 2020-2022

| KONSUMER 2020 | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|--------------|-----------------------|
| Cabang | KOLEKTABILITAS | | | ABS NPL | NPL | TOTAL KREDIT |
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| KC KHUSUS JAKARTA | | | | 0 | 0.00% | 3,160,755,228 |
| KCP BENDUNGAN HILIR | | | | 0 | 0.00% | 71,500,064 |
| KCP CEMPAKA MAS | | | | 0 | 0.00% | 75,243,773 |
| KCP CIDENG | | | | 0 | 0.00% | 1,808,353,133 |
| KCP CIKINI | | | | 0 | 0.00% | 4,409,763,760 |
| KCP JATINEGARA | | | | 0 | 0.00% | 1,322,014,853 |
| KCP KRAMATJATI | | | | 0 | 0.00% | 472,784,045 |
| KCP MENARA JAMSOSTEK | | | | 0 | 0.00% | 1,116,413,138 |
| KCP PASAR BARU | | | | 0 | 0.00% | 115,344,424 |
| KCP SENEN | | | | 0 | 0.00% | 745,999,588 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13,298,172,006 |

| KONSUMER 2021 | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|--------------|-----------------------|
| Cabang | KOLEKTABILITAS | | | ABS NPL | NPL | TOTAL KREDIT |
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| KC KHUSUS JAKARTA | | | | 0 | 0,00% | 4.257.419.896 |
| KCP BENDUNGAN HILIR | | | | 0 | 0,00% | 757.048.653 |
| KCP CEMPAKA MAS | | | | 0 | 0,00% | 75.243.773 |
| KCP CIDENG | | | | 0 | 0,00% | 3.176.961.041 |
| KCP CIKINI | | | | 0 | 0,00% | 6.957.664.937 |
| KCP JATINEGARA | | | | 0 | 0,00% | 3.064.465.592 |
| KCP KRAMATJATI | | | | 0 | 0,00% | 1.202.597.942 |
| KCP MENARA JAMSOSTEK | | | | 0 | 0,00% | 1.639.958.553 |
| KCP PASAR BARU | | | | 0 | 0,00% | 382.722.666 |
| KCP SENEN | | | | 0 | 0,00% | 1.367.059.748 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 22.881.142.801 |

| KONSUMER 2022 | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|--------------|-----------------------|
| Cabang | KOLEKTABILITAS | | | ABS NPL | NPL | TOTAL KREDIT |
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| KC KHUSUS JAKARTA | | | | 0 | 0,00% | 7.188.167.496 |
| KCP BENDUNGAN HILIR | | | | 0 | 0,00% | 1.846.940.491 |
| KCP CEMPAKA MAS | | | | 0 | 0,00% | 783.152.301 |
| KCP CIDENG | | | | 0 | 0,00% | 5.649.248.696 |
| KCP CIKINI | | | | 0 | 0,00% | 10.068.908.761 |
| KCP JATINEGARA | | | | 0 | 0,00% | 5.707.432.440 |
| KCP KRAMATJATI | | | | 0 | 0,00% | 1.650.597.942 |
| KCP MENARA JAMSOSTEK | | | | 0 | 0,00% | 1.970.816.488 |
| KCP PASAR BARU | | | | 0 | 0,00% | 742.619.549 |
| KCP SENEN | | | | 0 | 0,00% | 2.484.196.554 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 38.092.080.718 |

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat dari status kolektibilitas kredit Kosnsumer, dapat dilihat *track record* PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta tahun 2020-2022 mampu menjaga *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 0,0% dengan total pertumbuhan kredit pada akhir tahun 2022 sebesar Rp. 38.092.080.718 (tiga puluh delapan milyar sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Hasil Perhitungan *Non Performing Loan* Kredit Ritel PT. Bank Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta Tahun 2020-2022

| RITEL 2020 | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| Cabang | KOLEKTABILITAS | | | ABS NPL | NPL | TOTAL KREDIT |
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| KC KHUSUS JAKARTA | 1.078.740.646 | | | 1.078.740.646 | 3,85% | 28.050.215.756 |
| KCP BENDUNGAN HILIR | 32.965.470 | 931.291.056 | 1.277.257.462 | 2.241.513.988 | 2,98% | 75.217.438.457 |
| KCP CEMPAKA MAS | | | | 0 | 0,00% | 18.458.755.394 |
| KCP CIDENG | 381.447.916 | | 86.102.123 | 467.550.039 | 1,84% | 25.444.027.512 |
| KCP CIKINI | | 265.443.891 | | 265.443.891 | 0,48% | 54.826.760.883 |
| KCP JATINEGARA | 228.777.483 | 88.236.988 | | 317.014.471 | 0,90% | 35.277.671.268 |
| KCP KRAMATJATI | | | | 0 | 0,00% | 21.418.175.678 |
| KCP MENARA JAMSOSTEK | | | | 0 | 0,00% | 13.762.149.216 |
| KCP PASAR BARU | | 130.151.530 | 536.298.368 | 666.449.898 | 1,90% | 35.029.756.223 |
| KCP SENEN | | | | 0 | 0,00% | 12.950.114.372 |
| TOTAL | 1.721.931.515 | 1.415.123.465 | 1.899.657.953 | 5.036.712.933 | 1,57% | 320.435.064.759 |

$$2020 = \frac{5.036.712.933}{320.435.064.759} \times 100\% = 1,57\%$$

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat dari status kolektibilitas kredit Ritel, dapat dilihat *track record* tahun 2020 total *Absolute Non Performing Loan* sebesar Rp. 5.036.712.933 (lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau

sebesar 1,57% dari total pertumbuhan kredit tahun 2020 Rp. 320.435.064.759 (tiga ratus dua puluh milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah)

| RITEL 2021 | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| Cabang | KOLEKTABILITAS | | | ABS NPL | NPL | TOTAL KREDIT |
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| KC KHUSUS JAKARTA | | | 1,078,740,646 | 1,078,740,646 | 2.50% | 43,192,244,923 |
| KCP BENDUNGAN HILIR | | | 2,501,590,775 | 2,501,590,775 | 2.65% | 94,232,517,090 |
| KCP CEMPAKA MAS | | | | 0 | 0.00% | 32,863,437,561 |
| KCP CIDENG | 423,378,657 | | 122,973,184 | 546,351,841 | 1.50% | 36,488,859,553 |
| KCP CIKINI | | 504,736,877 | 137,681,953 | 642,418,830 | 0.74% | 86,317,050,550 |
| KCP JATINEGARA | | | 317,014,471 | 317,014,471 | 0.60% | 52,627,607,409 |
| KCP KRAMATJATI | | | | 0 | 0.00% | 32,640,236,012 |
| KCP MENARA JAMSOSTEK | | | | 0 | 0.00% | 23,937,605,637 |
| KCP PASAR BARU | | 231,079,935 | 666,449,898 | 897,529,833 | 2.01% | 44,634,139,834 |
| KCP SENEN | | | | 0 | 0.00% | 20,298,109,243 |
| TOTAL | 423,378,657 | 735,816,812 | 4,824,450,927 | 5,983,646,396 | 1.28% | 467,231,807,812 |
| Kenaikan ABS NPL | | | | | | 946,933,463 |
| Kenaikan NPL (%) | | | | | | -0.29% |

$$2021 = x100\% = \frac{5.983.646.396}{467.231.807.812} \quad 1,28\%$$

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat dari status kolektibilitas kredit Ritel, dapat dilihat *track record* total *Absolute Non Performing Loan* sebesar Rp. 5.983.646.396 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 1,28% dari total pertumbuhan kredit tahun 2021 Rp. 467.231.807.812 (empat ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah)

| RITEL 2022 | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| Cabang | KOLEKTABILITAS | | | ABS NPL | NPL | TOTAL KREDIT |
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| KC KHUSUS JAKARTA | | | 1.078.740.646 | 1.078.740.646 | 1,37% | 78.824.216.029 |
| KCP BENDUNGAN HILIR | | | 2.501.590.775 | 2.501.590.775 | 1,74% | 143.370.732.743 |
| KCP CEMPAKA MAS | | | | 0 | 0,00% | 48.907.618.707 |
| KCP CIDENG | | | 423.378.657 | 423.378.657 | 0,88% | 47.860.114.224 |
| KCP CIKINI | | | 504.736.877 | 504.736.877 | 0,42% | 119.963.028.872 |
| KCP JATINEGARA | | | 317.014.471 | 317.014.471 | 0,36% | 88.109.801.373 |
| KCP KRAMATJATI | | | | 0 | 0,00% | 52.210.738.417 |
| KCP MENARA JAMSOSTEK | | | | 0 | 0,00% | 34.454.018.733 |
| KCP PASAR BARU | | | 231.079.935 | 231.079.935 | 0,40% | 58.277.920.518 |
| KCP SENEN | | | | 0 | 0,00% | 31.923.347.651 |
| TOTAL | 0 | 0 | 5.056.541.361 | 5.056.541.361 | 0,72% | 703.901.537.267 |
| Kenaikan ABS NPL | | | | | | -927.105.035 |
| Kenaikan NPL (%) | | | | | | -0,56% |

$$2022 = x100\% = \frac{5.056.541.361}{702.974.432.232} = 0,72\%$$

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat dari status kolektibilitas kredit Ritel, dapat dilihat *track record* PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta tahun 2022 total *Absolute Non Performing Loan* sebesar Rp. 5.056.541.361 (lima milyar lima puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 0,72% dari total pertumbuhan kredit tahun 2022 Rp. 702.974.432.232 (tujuh ratus dua milyar sembilan

ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Hasil Perhitungan Non Performing Loan Konsumer & Ritel PT. Bank Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta Tahun 2020-2022

| TOTAL KONSUMER & RITEL 2020 | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| Cabang | KOLEKTABILITAS | | | ABS NPL | NPL | TOTAL KREDIT |
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| KC KHUSUS JAKARTA | 1.078.740.646 | 0 | 0 | 1.078.740.646 | 3,46% | 31.210.970.984 |
| KCP BENDUNGAN HILIR | 32.965.470 | 931.291.056 | 1.277.257.462 | 2.241.513.988 | 2,98% | 75.288.938.521 |
| KCP CEMPAKA MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 18.533.999.167 |
| KCP CIDENG | 381.447.916 | 0 | 86.102.123 | 467.550.039 | 1,72% | 27.252.380.645 |
| KCP CIKINI | 0 | 265.443.891 | 0 | 265.443.891 | 0,45% | 59.236.524.643 |
| KCP JATINEGARA | 228.777.483 | 88.236.988 | 0 | 317.014.471 | 0,87% | 36.599.686.121 |
| KCP KRAMATIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 21.890.959.723 |
| KCP MENARA JAMSOSTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 14.878.562.354 |
| KCP PASAR BARU | 0 | 130.151.530 | 536.298.368 | 666.449.898 | 1,90% | 35.145.100.647 |
| KCP SENEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 13.696.113.960 |
| TOTAL | 1.721.931.515 | 1.415.123.465 | 1.899.657.953 | 5.036.712.933 | 1,51% | 333.733.236.765 |

| TOTAL KONSUMER & RITEL 2021 | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| Cabang | KOLEKTABILITAS | | | ABS NPL | NPL | TOTAL KREDIT |
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| KC KHUSUS JAKARTA | 0 | 0 | 1.078.740.646 | 1.078.740.646 | 2,27% | 47.449.664.819 |
| KCP BENDUNGAN HILIR | 0 | 0 | 2.501.590.775 | 2.501.590.775 | 2,63% | 94.989.565.743 |
| KCP CEMPAKA MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 32.938.681.334 |
| KCP CIDENG | 423.378.657 | 0 | 122.973.184 | 546.351.841 | 1,38% | 39.665.820.594 |
| KCP CIKINI | 0 | 504.736.877 | 137.681.953 | 642.418.830 | 0,69% | 93.274.715.487 |
| KCP JATINEGARA | 0 | 0 | 317.014.471 | 317.014.471 | 0,57% | 55.692.073.001 |
| KCP KRAMATIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 33.842.833.954 |
| KCP MENARA JAMSOSTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 25.577.564.190 |
| KCP PASAR BARU | 0 | 231.079.935 | 666.449.898 | 897.529.833 | 1,99% | 45.016.862.500 |
| KCP SENEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 21.665.168.991 |
| TOTAL | 423.378.657 | 735.816.812 | 4.824.450.927 | 5.983.646.396 | 1,22% | 490.112.950.613 |
| Pertumbuhan Kredit 2020 - 2021 (Rp) | | | | | | 156.379.713.848 |
| Pertumbuhan Kredit 2020 - 2021 (%) | | | | | | 46,86% |
| Kenaikan ABS NPL | | | | | | 946.933.463 |
| Kenaikan NPL (%) | | | | | | -0,29% |

| TOTAL KONSUMER & RITEL 2022 | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| Cabang | KOLEKTABILITAS | | | ABS NPL | NPL | TOTAL KREDIT |
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| KC KHUSUS JAKARTA | 0 | 0 | 1.078.740.646 | 1.078.740.646 | 1,25% | 86.012.383.525 |
| KCP BENDUNGAN HILIR | 0 | 0 | 2.501.590.775 | 2.501.590.775 | 1,72% | 145.217.673.234 |
| KCP CEMPAKA MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 49.690.771.008 |
| KCP CIDENG | 0 | 0 | 423.378.657 | 423.378.657 | 0,79% | 53.509.362.920 |
| KCP CIKINI | 0 | 0 | 504.736.877 | 504.736.877 | 0,39% | 130.031.937.633 |
| KCP JATINEGARA | 0 | 0 | 317.014.471 | 317.014.471 | 0,34% | 93.817.233.813 |
| KCP KRAMATIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 53.861.336.359 |
| KCP MENARA JAMSOSTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 36.424.835.221 |
| KCP PASAR BARU | 0 | 0 | 231.079.935 | 231.079.935 | 0,39% | 59.020.540.067 |
| KCP SENEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 34.407.544.205 |
| TOTAL | 0 | 0 | 5.056.541.361 | 5.056.541.361 | 0,68% | 741.993.617.985 |
| Pertumbuhan Kredit 2021 - 2022 (Rp) | | | | | | 251.880.667.372 |
| Pertumbuhan Kredit 2021 - 2022 (%) | | | | | | 51,39% |
| Kenaikan ABS NPL | | | | | | -927.105.035 |
| Kenaikan NPL (%) | | | | | | -0,54% |

Berdasarkan data tersebut untuk produk Konsumer & Ritel PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dapat dilihat *track record* pertumbuhan kredit tahun 2020-2021 sebesar 46,86% dan pada tahun 2021-2022 sebesar 51,20%. Sementara untuk *Non Performing Loan* (NPL) kredit Konsumer & Ritel PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Angka rasio NPL tidak melebihi dari standar Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan untuk NPL maksimum sebesar 5%. Dapat dilihat *track record* PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten mampu menjaga *Non Performing Loan*

(NPL) pada tahun 2020 sebesar 1,51% , pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,22% dan tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,68%.

Dilihat dari data tersebut perbandingan pertumbuhan kredit dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang terjaga dengan baik, artinya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten mampu berkomitmen untuk melakukan ekspansi kredit yang berkualitas dengan selalu menerapkan manajemen risiko yang baik sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Ketentuan Pola Penyaluran Kredit yang diatur oleh Divisi Perencanaan dan Divisi Kepatuhan.

Kondisi *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena *Non Performing Loan* (NPL) cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata 1,14%. Namun PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perlu melakukan antisipasi agar NPL tidak kembali mengalami kenaikan melalui manajemen risiko kredit yang lebih baik sehingga tidak merugikan bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta dalam menerapkan manajemen risiko, bank harus mengidentifikasi risiko pada tahap awal dengan mengidentifikasi dan memahami semua risiko yang ada pada bank, termasuk risiko yang timbul dari perusahaan.

Pada saat yang sama, bank wajib menilai risiko yang relevan, terutama yang bersifat material atau yang mempengaruhi modal perusahaan, dan melaporkan hasil penilaian secara tepat waktu, akurat, dan jelas untuk memantau risiko yang akan digunakan pihak pengambil keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, termasuk tindak lanjut yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, menjaga stabilitas antara penyaluran kredit dengan kredit macet, dan teknis mitigasi risiko penyaluran kredit.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah melakukan

evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko yang sudah diterbitkan minimal satu kali dalam satu tahun.

PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten memiliki sistem administrasi yang memadai yang memastikan bahwa seluruh dokumentasi kredit dan proses administrasi yang menyertainya tersimpan dengan baik sesuai ketentuan batas waktu penyimpanan dokumen yang ditetapkan. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten melalui Divisi Skai (Satuan Kerja Audit Internal) dan KIC (Kontrol Internal Cabang) yang dibawahi oleh unit Pengendalian Risiko memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi pengendalian risiko yang ditetapkan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk tolerance/risk appetite*) dan secara berkala dilakukan review.

Manajemen Risiko pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan, yaitu:

1. Pelaporan hasil kunjungan dalam call report belum dilaksanakan secara Analisis kredit kurang berhati-hati sehingga memberikan kredit kepada debitur dengan perhitungan simulasi yang melebihi dari batas ketentuan sehingga dampaknya debitur menjadi tidak komitmen dan tidak kooperatif untuk membayar kewajiban angsuran disetiap bulannya, karena sisa penghasilan debitur tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Monitoring terhadap debitur maksimal.

Penerapan manajemen risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sudah sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia, yaitu:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
2. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit
4. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit
5. Pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko kredit

Non Performing Loan (NPL) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020 sampai 2022 secara rata-rata mengalami penurunan. Secara keseluruhan NPL PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten masih dapat dikategorikan kedalam kondisi Bank yang memiliki *Non Performing Loan* (NPL) secara sehat, yaitu tidak

melebihi 5% sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan manajemen risiko yang diterapkan sudah berjalan dengan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dapat terus mempertahankan status sebagai Bank yang sehat.

SARAN

1. Sebaiknya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten mempertegas penerapan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan pada pemberian keputusan atas kredit yang diberikan dari prosedur permohonan kredit sampai dengan prosedur penyelamatan kredit/pembiayaan bermasalah agar tidak terjadi kesalahan sehingga risiko kredit dapat diminimalisir, *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Jakarta masih dibawah dari batas ketentuan yang diberikan Bank Indonesia yaitu sebesar 5% namun tetap perlu adanya peningkatan strategi manajemen risiko agar dapat menekan atau mengurangi NPL ditahun berikutnya. Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten harus tetap mempertahankan dalam segi penerapan manajemen risiko yang baik.
2. Tindakan untuk mengurangi kredit bermasalah juga dapat dilakukan dengan mengurangi resiko kredit dengan cara menilai iktikad baik permohonan pembiayaan yang dapat dilihat dari prinsip 5C yaitu (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*). Analisis ini sangat efektif untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan sangat efektif dalam melakukan pengawasan kredit macet.
3. Untuk dapat menambahkan variabel lain di luar variabel yang saya teliti

DAFTAR REFERENSI

- Admadianto, H. N., Trisnawati, R., & Ak, M. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Pengungkapan Modal Intelektual, Asimetri Informasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Cost Of Equity Capital (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Indeks Jii Dan Lq 45 Selama Tahun 2004-2015) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Andrianto. (2019). *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*. Pasuruan: CV. Qiara Media.
- Depati, H. (2017). *Analisa Kredit*. Yogyakarta: Asma Media.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi* . Bandung: PT. Alfabeta.

- Handayani, E. F. (2015). Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas Dan Likuiditas Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 1-31.
- Hariyani, S. (2017). *Bisnis "Berkebun Emas" Cet. 4*. Bogor: Al Azhar Press.
- Hayati, S. (2017). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Andi.
- Indonesia, I. B. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, I. B. (2017). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Indonesia, I. B. (2018). *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung , S. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Nguyen, N. (2018). Hidden Markov Model for Stock Trading . *International Journal of Financial Studies* , 1-17.
- Ningsih, R., & Ariani, N. (2016). Pengaruh Asimetri Informasi, Pengungkapan Modal Intelektual Dan Kualitas Audit Terhadap Biaya Modal Ekuitas (studi pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014). *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 149-157.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 46/POJK.03/2017 tanggal 12 juli 2017, tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/ POJK. 03/ 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 - Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Przepiorka, W., & Berger, J. (2017). Signaling Theory Evolving: Signals and Signs of Trustworthiness in Social Exchange. 1-14.
- Rianingtyas, R., & Trisnawati, R. (2017). Pengaruh Pengungkapan CSR, Manajemen Laba dan Asimetri Informasi terhadap Cost of Equity Capital dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ-45 Tahun 2010-2015 . 157-171.
- Rosmawati, W., Asry, S., & Harahap, I. (2023). The Influence of Internal Control, Compliance with Accounting Rules and Compatibility of Compensation on the Trend of Accounting Fraud. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 713–717. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1125>
- Shella, & Wedari, L. (2016). Intellectual Capital Dan Intellectual Capital Disclosure Terhadap Market Performance Pada Perusahaan Publik Indeks LQ-45. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* , 28-38.
- Sugiyoono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Thamrin , A., & Wahjusaputri, S. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Yulianti, E., Aliamin, A., & Ibrahim, R. (2018). The Effect of Capital Adequacy and Bank Size on Non-Performing Loans in Indonesian Public Banks. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 1(2), 205–214. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v1i2.11709>